



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jln. Arief Rahman Hakim No. 22 Kota Kotamobagu 95711 email : dprkp.kk@gmail.com

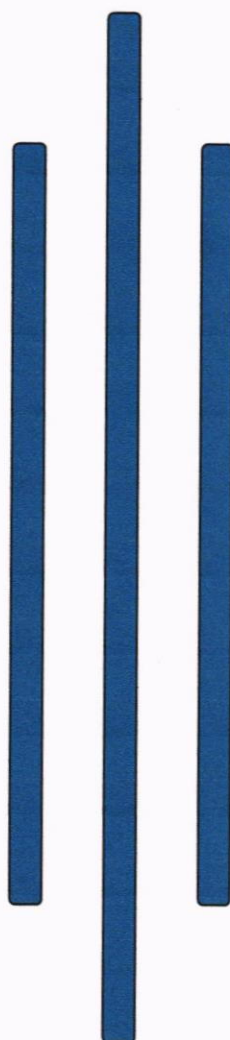
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

(LAKIP)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA KOTAMOBAGU



TAHUN ANGGARAN 2017

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah S.W.T karena berkat izin dan perkenannya semata Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu dapat tersusun.

LAKIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Strategik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu Tahun 2017 – 2018 yang merupakan penjabaran Program dan Kegiatan dari masing – masing Bidang.

Tolak ukur penyusunan ini juga didasarkan pada bentuk kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu yang bertujuan untuk mewujudkan Visi yang ditetapkan yakni : **“PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG MEMENUHI AZAS KUALITAS, KUANTITAS DAN KONTINUITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DIKAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING.”**

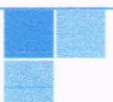
Selanjutnya dengan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada tanggal 24 September 2013 dan dengan penerapan PP 41 Tahun 2007 dimana Nomenklatur Dinas berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman serta untuk menyesuaikan dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran guna perbaikan sangat kami harapkan. Terima Kasih.

Kotamobagu, November 2017
**Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu**



Ir. IMRAN AMON
Pembina Utama Muda
Nip. 19600613 199403 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..	1
1.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Organisasi	1
1.2 Data Organisasi	2
1.2.1 Dasar Pembentukan SKPD.....	2
1.2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman..	2
1.2.3 Kinerja Pelayanan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3
1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3 Perumusan Isu-isu Strategis.....	15
1.4 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan.....	17
BAB II - PERENCANAAN KERJA.....	20
1.5 Rencana Strategi.....	20
1.5.1 Visi dan Misi	20
1.6 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan.....	21
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja	30
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	30
BAB IV - PENUTUP	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

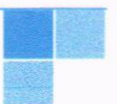
Keberadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu Pokok - pokok sasaran Pembangunan adalah :

- Permukiman Swadaya dan terstruktur.
- Perumahan tidak layak huni
- Kepadatan Permukiman
- Perumahan dikawasan rawan bencana
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- Genangan Air
- Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Prasarana Air bersih
- Prasarana Air limbah
- Pengembangan Wilayah strategis
- Persampahan

Dalam menangani aspek – aspek tersebut diatas maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota kotamobagu, Mempunyai tugas dan fungsi yang erat dalam Pelayanan pembangunan berkelanjutan.

1.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu merupakan pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dibidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Susunan organisasi Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Kota Kotamobagu berdasarkan peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan,



Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu yang meliputi:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Perumahan
 - Kepala Seksi Penataan bangunan
 - Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Perumahan
 - Kepala Seksi Fasilitas Umum
- d. Bidang Kawasan Permukiman
 - Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman
 - Kepala Seksi Sarana Prasarana Air Bersih ,Air Limbah dan Persampahan
 - Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Air Bersih dan Air Limbah
 -

1.2 Data Organisasi

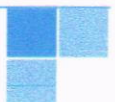
1.2.1 Dasar Pembentukan SKPD

1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
2. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu.
3. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu

1.2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu didukung oleh ketersediaan personil dengan komposisi sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|------------|
| - PNS Pejabat Struktural | : 12 Orang |
| - PNS Fungsional Umum/Staf | : 17 Orang |
| - Tenaga Kontrak | : 74 Orang |



Tabel 1. Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Org)
1	Strata 3 (S-3)	-
2	Strata 2 (S-2)	3 Orang
3	Strata 1 (S-1)	14 Orang
4	Sarjana Muda/D3	7 Orang
5	SLTA/SMK	5 Orang

Tabel 2. Komposisi PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan

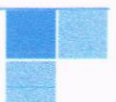
NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH (Org)
1	Diklat PIM II	
2	Diklat PIM III	1 Orang
3	Diklat PIM IV	2 Orang

Tabel 3. Komposisi PNS Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Org)
1	I	-
2	II	10 Orang
3	III	17 Orang
4	IV	2 Orang

1.2.3 Kinerja Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Formula
1	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembangunan air (minimal 1.5m)	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (KM)}}{\text{panjang seluruh drainase didaerah kabupaten (KM)}} \times 100$
2	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (KM)}}{\text{panjang seluruh drainase didaerah kabupaten (KM)}} \times 100$
3	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (KM)}}{\text{panjang seluruh drainase didaerah kabupaten (KM)}} \times 100$
4	Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
5	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100$
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{jumlah rumah tinggal}} \times 100$
7	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$
8	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB	$\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas Wilayah ber HPL/HGB}} \times 100$
9	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luas RTH Publik yang Tersedia diakhir tahun Pencapaian SPM}}{\text{Luasan RTH Publik yang seharusnya Tersedia diwilayah Kota / kawasan perkotaan}} \times 100$
10	Rasio rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$
11	Rasio permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas pemukiman layak huni}}{\text{luas wilayah permukiman}} \times 100$
12	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah rumah di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100$
13	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah rumah}} \times 100$
14	Persentase permukiman yang tertata	$\frac{\text{Luas Area Permukiman Tertata}}{\text{Luas Area Permukiman Keseluruhan}} \times 100$

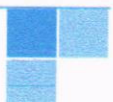
1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, Tugas dan Fungsi Kepala Dinas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan permukiman
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perumahan dan kawasan permukiman
 - e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perumahan dan kawasan permukiman
 - f. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan
 - g. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Tugas dan Fungsi Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan
2. Untuk melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi
 - b. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan
 - c. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan
 - d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian



- e. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan
- f. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.
2. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian
 - c. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi
 - d. Menata dan memelihara sarana dan prasarana
 - e. Menyiapkan bahan dan data kepegawaian
 - f. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian
 - g. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan
 - h. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian
 - i. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas
 - j. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga
 - k. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/asset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
 - l. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tatalaksana dan pengelolaan kesekretariatan
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

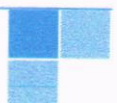
Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan
 - b. mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program dalam satuan kerja.
 - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja.
 - d. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
 - e. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran / keuangan dan belanja
 - f. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran
 - g. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran
 - h. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan
 - i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
 - j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

Tugas dan Fungsi Bidang Perumahan

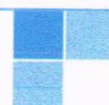
1. Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan , penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



2. Dalam melaksanakan tugas Bidang perumahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perumahan
 - b. Perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang perumahan
 - c. Pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan system pembiayaan bidang perumahan
 - d. Pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan
 - e. Pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan
 - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

Tugas dan Fungsi Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Perumahan

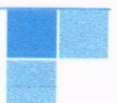
1. Seksi pengembangan dan pengelolaan perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan pengelolaan pembangunan perumahan dan tugas pelayanan pembinaan perumahan
2. Dalam melaksanakan tugas seksi pengembangan dan pengelolaan perumahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan dan pengelolaan perumahan
 - b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang pengembangan dan pengelolaan perumahan
 - c. Melaksanakan Pembangunan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan perumahan
 - d. Memfasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraannya
 - e. Memfasilitasi percepatan pembagunan perumahan
 - f. Melaksanakan pembangunan rumah susun sederhana
 - g. Melaksanakan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan
 - h. Melaksanakan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah
 - i. Menyusun rumusan pedoman dan manual penghunian dan pengelolaan perumahan



- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun dan rumah khusus
- k. Menyusun peraturan, kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh
- l. Menyusun regulasi tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh
- m. Melaksanakan penanganan kawasan kumuh perkotaan
- n. Melaksanakan evaluasi program penanganan permukiman kumuh
- o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, pedoman dan kriteria
- p. Melaksanakan pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahan baik BUMN, BUMD, Koperasi, Perorangan maupun Swasta yang bergerak dibidang usaha industry bahan bangunan, industry komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.
- q. Melaksanakan pembangunan rumah contoh rumah sederhana sehat sebagai simulasi pada daerah terpencil
- r. Menyusun rumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
- s. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Tugas dan Fungsi Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

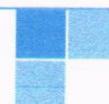
1. Seksi penataan bangunan dan lingkungan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penataan bangunan dan lingkungan
2. Dalam melaksanakan tugas seksi Penataan bangunan dan lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi penataan bangunan dan lingkungan.
 - b. menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan bangunan dan lingkungan
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang penataan bangunan dan lingkungan dengan unit/instansi terkait



- e. Melaksanakan pengolahan data pembangunan gedung pemerintah dan bangunan public
- f. Melaksanakan evaluasi hasil kerja perencanaan sebagai dokumen pelaksanaan pembangunan
- g. Melaksanakan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan public
- h. Monitoring pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan public
- i. Melaksanakan rehabilitasi dan renovasi gedung pemerintah dan bangunan public
- j. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, penghapusan, dan penaksiran gedung pemerintah dan bangunan public
- k. Menyusun kebijakan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.
- l. Melaksanakan koordinasi pengelolaan pembangunan
- m. Melaksanakan identifikasi data dan analisa permasalahan pelanggaran peraturan bangunan
- n. Melaksanakan identifikasi data dan analisa permasalahan pelanggaran peraturan bangunan
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Tugas dan Fungsi Seksi Pengembangan Fasilitas Umum

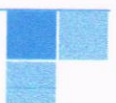
1. Seksi Pengembangan Fasilitas Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan fasilitas umum.
2. Dalam melaksanakan tugas seksi pengembangan fasilitas umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan fasilitas umum
 - b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang pengembangan fasilitas umum
 - c. Melaksanakan pembangunan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan perumahan



- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, pedoman dan kriteria.
- e. Menyusun kebijakan, strategi dan program serta norma, standar, pedoman dan kriteria bidang fasilitas umum
- f. Melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan fasilitas umum
- g. Menyusun pedoman dan manual, perencanaan, pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas, fasilitas umum dan fasilitas social
- h. Menyusun pedoman dan manual perencanaan dan pembangunan pertamanan dan pemakaman
- i. Memberi rekomendasi penyerahan lahan tempat pemakaman umum
- j. Melaksanakan pembangunan rusunawa dan rusunami lengkap dengan penyediaan lahan dan PSU, Fasilitas Umum dan fasilitas Sosial
- k. Melaksanakan Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulant di RSH, Rusun dan Rusus
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- m. Melaksanakan koordinasi pengelolaan pengembangan fasilitas umum dengan instansi terkait
- n. Melakukan monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

Tugas dan Fungsi Bidang Kawasan Permukiman

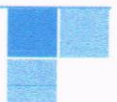
1. Bidang kawasan permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas dibidang pengelolaan kawasan permukiman yang meliputi pembangunan, pembinaan teknis serta pengembangan teknologi dan industry prasarana lingkungan permukiman.
2. Dalam melaksanakan tugas bidang kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kawasan permukiman



- b. Perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang kawasan permukiman
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman
- d. Penyusunan rencana teknis bidang kawasan permukiman
- e. Pembinaan, Pengaturan dan Bimbingan teknis bidang kawasan permukiman
- f. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta desiminasi bimbingan teknis bidang kawasan permukiman
- g. Pengelolaan sarana prasarana bidang kawasan permukiman
- h. Penanggulangan sarana prasarana bidang kawasan permukiman
- i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

Tugas dan Fungsi Seksi Sarana Prasarana Air Bersih, Air Limbah dan Persampahan

1. Seksi Sarana Prasarana Air Bersih, Air Limbah dan Persampahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
2. Dalam melaksanakan tugas seksi Sarana Prasarana Air Bersih, Air Limbah dan persampahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi sarana prasarana air bersih, air limbah dan persampahan
 - b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang sarana prasarana air bersih, air limbah dan persampahan
 - c. Menyiapkan kebijakan teknis bidang sarana prasarana air bersih, air limbah dan persampahan
 - d. Menyusun rencana induk pengembangan sarana prasarana
 - e. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan pengembangan sarana prasarana



- f. Menyediakan, memelihara, mengawasi, dan mengendalikan sarana prasarana
- g. Mengembangkan teknologi bidang sarana prasarana
- h. Menyusun regulasi dan kebijakan pengembangan sarana prasarana
- i. Menyusun rencana teknis pembangunan sarana prasarana
- j. Menyiapkan dokumen teknis pembangunan sarana prasarana
- k. Menyiapkan bahan rekomendasi perencanaan teknis pembangunan sarana prasarana
- l. Mengelola data sarana prasarana
- m. Mengadakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kegiatan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

Tugas dan Fungsi Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman

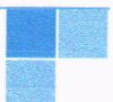
1. Seksi Penyehatan lingkungan dan pemukiman mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program operasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat
2. Dalam melaksanakan tugas seksi penyehatan lingkungan dan pemukiman menyelenggarakan tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi penyehatan lingkungan dan pemukiman
 - b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang penyehatan lingkungan dan permukiman
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan dan permukiman
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan perencanaan
 - e. Memberikan bantuan teknis pelaksanaan penyehatan lingkungan dan pemukiman
 - f. Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penataan dan penyehatan lingkungan dan pemukiman
 - g. Menyiapkan data kebutuhan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan pemukiman



- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan program kegiatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

Tugas dan Fungsi Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Air Bersih dan Air Limbah

1. Seksi Pengelolaan dan pengendalian air bersih dan air limbah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan urusan bidang air bersih dan air limbah.
2. Dalam melaksanakan tugas seksi pengelolaan dan pengendalian air bersih dan air limbah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengelolaan dan pengendalian air bersih dan air limbah
 - b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang pengelolaan dan pengendalian air bersih dan air limbah
 - c. Mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air bersih air limbah
 - d. Menyusun pedoman, regulasi, dan kebijakan dalam pembangunan, pemasangan instalasi dan transmisi
 - e. Memelihara dan mengendalikan pemanfaatan sarana prasarana air bersih dan air limbah
 - f. Melaksanakan pemasangan instalasi dan transmisi air bersih dan air limbah
 - g. Melaksanakan operasional instalasi produksi air bersih
 - h. Memastikan dan mengawasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas pengaliran air bersih
 - i. Melaksanakan fungsi-fungsi laboratorium
 - j. Mengatur pendistribusian air bersih / minum secara merata kepada masyarakat
 - k. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan jaringan dan pipa distribusi
 - l. Melaksanakan pemeriksaan berkala
 - m. Melakukan pemutusan sambungan pelanggan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan



- n. Membuat peta pelanggan dan jaringan pipa serta perlengkapan pendukungnya
- o. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

1.3 Perumusan Isu-Isu Strategis

a. Permasalahan Bidang Perumahan Rakyat

Gambaran umum kondisi urusan perumahan dapat adalah sebagai berikut:

- Sarana perumahan selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam peranannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawatahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan akan rumahnya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis.

Terkait dengan persoalan perumahan dimana kaum miskin menanggung konsekwensi terbesar dengan berbagai alasan seperti:

- a. Mata pencaharian sebagian besar kaum miskin terkait langsung dengan mutu dan produktivitas sumber daya alam seperti air, lahan, hutan dan lain-lain.
- b. Keluarga miskin terkadang memiliki tingkat akses terendah ke jasa dan manfaat sumber daya yang ada seperti air minum, masalah sanitasi yang sehat dan sumber energi lainnya.



- c. Selanjutnya terkait dengan rumah tangga miskin umumnya menjadi isu lingkungan terkait dengan adanya permukiman kumuh di perkotaan dengan sistem sanitasi yang tidak layak

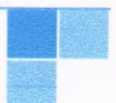
Bidang Perumahan berdasarkan tugas dan fungsinya untuk Perencanaan, Penyediaan, Pembiayaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi dibidang Perumahan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan

Beberapa permasalahan terkait dengan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan perumahan yang layak huni bagi warga kurang mampu belum maksimal, dimana bertambahnya keluarga baru menjadi faktor.
2. Belum optimalnya perkembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh berupa adanya dukungan akses jalan yang terpadu
3. Ruang terbuka hijau yang masih kurang
4. Kualitas dan kuantitas jaringan jalan di area permukiman yang belum memadai
5. Belum adanya PERDA yang mengatur tentang Rusunawa
6. Perencanaan Tatakelola Rusunawa yang belum tertata
7. Kebutuhan PSU yang terus meningkat

b. Permasalahan Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman telah memberikan andil dalam kegiatan prasarana di Kota Kotamobagu terutama Pembangunan Sarana prasarana Air Bersih, Pembangunan IPAL. Drainase/Gorong-gorong. Namun seiring berjalannya waktu kebutuhan akan pelayanan sarana dan prasarana terus meningkat diakibatkan oleh laju populasi penduduk dan perluasan area pemukiman, kurangnya kesadaran masyarakat serta belum maksimalnya



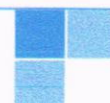
sosialisasi menjaga lingkungan mempengaruhi indikator capaian hasil, adapun kondisi saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kondisi drainase masih kurang baik
2. Kurangnya cakupan air bersih
3. Belum terlayannya kota secara memadai untuk penanganan air limbah terpadu dengan IPAL
4. Penataan hunian yang layak akses sanitasi yang masih minim
5. Ketersedian Alat Pemadam Kebakaran Hidrand yang masih kurang
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri serta tatakelola sanitasi yang layak.
7. Kebutuhan Drainase/Gorong-gorong, Prasarana Air Bersih dan Air Limbah yang terus meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk

1.4 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Penyusunan strategi dilakukan dengan pendekatan formulasi strategi matrik SWOT, yang berdasarkan pada pemberdayaan sumber daya unggulan organisasi atau faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka berdasarkan peta kekuatan organisasi, selanjutnya disusun formulasi strategi dengan mengintegrasikan faktor kekuatan kunci dari faktor internal dan eksternal, yang secara umum melahirkan empat strategi sebagai berikut :

- a. Strategi SO : Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Dilaksanakan dengan strategi ekspansi (pengembangan, pertumbuhan dan perluasan)
- b. Strategi ST : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, Dilaksanakan dengan strategi diversifikasi mobilisasi kekuatan, inovasi pembaharuan, modifikasi
- c. Strategi WO : Meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, dilaksanakan dengan stabilitas, rasionalitas, investasi



/divestasi.

- d. Strategi WT : Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman, dilaksanakan dengan strategi defensif/ survaivel, investasi/ divestasi, efisiensi agar dapat bertahan tidak semakin terpuruk

Berikut adalah penjabaran analisis SWOT berdasarkan factor internal yang dimiliki:

1) Strengths (Kekuatan)

Kekuatan yang dapat dilihat adalah

- Sumber Daya manusia (SDM)
- Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor)
- Pembiayaan (Anggaran)
- Komitmen Pimpinan Organisasi
- Konsep Perencanaan Teknis yang Baik

2) Weakness (Kelemahan)

Kelemahan yang dapat dilihat adalah

- Masih kurang maksimal SDM yang mengcover pekerjaan – pekerjaan teknis (Tenaga Ahli)
- Belum terpenuhinya sarana prasarana untuk menunjang pekerjaan teknis
- Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan yang ada
- Inkonsistensi pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan mengikuti situasi dan kondisi
- Impelentasi konsep perencanaan yang tidak sesuai dengan yang disepakati

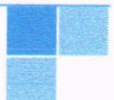
3) Opportunities (peluang)

- Konsultan dan Kontraktor
- Dinas, Departemen dan lembaga terkait lainnya
- Komitmen DPRD
- Komitmen Pimpinan Daerah
- Kondisi Alam/Lingkungan

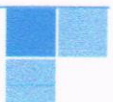
4) Threats (ancaman)

Ancaman yang kemungkinan didapat dari pihak luar adalah

- Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan dan kontraktor baik peralatan maupun tenaga ahli



- Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan proyek
- Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran dan proyek yang maksimal
- Kebijakan pimpinan daerah yang tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan dilapangan
- Bencana alam (Gempa bumi, Longsor, Banjir, Bencana non alam dan lain – lain)



BAB II

PERENCANAAN KERJA

1.5 Rencana Strategi

1.5.1 Visi dan Misi

a. Visi

Searah dengan kebijakan pemerintah daerah, rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang maka sesuai dengan makna tersebut **“VISI”** Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu 2014-2018, adalah :

“PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG MEMENUHI AZAS KUALITAS, KUANTITAS DAN KONTINUITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DIKAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING.”

b. Misi

Dinas PRKP Kota Kotamobagu sesuai dengan Tugas dan Pokok , adalah :

1. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Dinas, Perbendaharaan, Kepegawaian, administrasi Umum, dan pelengkapan yang didukung dengan sarana dan Sumber daya manusia yang berintegrasi, berkemampuan dan professional berbasis pemberdayaan, kemitraan dan kemandirian.
2. Menyelenggarakan Pelayanan, pembangunan, pengembangan, peningkatan sarana dan prasarana Air Bersih, Air Limbah, Drainase, dan Persampahan yang Memenuhi Azas kualitas, uantitas, dan Kontinuitas serta mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan, pengendalian, dan pencegahan pencemaran lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan Bangunan, perumahan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), areal pemakaman, wilayah strategis dan cepat tumbuh mendorong terciptanya pengaturan



berdasarkan hukum yang dapat diterapkan dalam pengelolaan bangunan, perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

1.6 Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan Pembangunan

Tujuan merupakan suatu target kuantitatif dari suatu organisasi yang bersifat spesifik dan terukur. Selain itu tujuan dapat mendorong kinerja organisasi dan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja organisasi. Adapun tujuan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Kotamobagu adalah:

1. Meningkatnya Drainase dalam kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air tidak tersumbat
2. Meningkatnya ketersediaan Air minum perkotaan / Pedesaan
3. Meningkatnya Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan Perkotaan
4. Meningkatnya Kawasan Cepat Tumbuh.

Sedangkan Sasaran Dinas PRKP Kota Kotamobagu adalah :

1. Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Persentase Drainase dalam kondisi baik / pembangunan aliran air tidak tersumbat
2. Meningkatnya ketersediaan air minum perkotaan/pedesaan
3. Meningkatnya Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan
4. meningkatnya kawasan cepat tumbuh

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategis

a. Sasaran Strategis

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target	
						2017	2018
Mewujudkan drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembangunan air (minimal 1.5 m)	7.04	Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembangunan air (minimal 1.5 m)	panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (KM) / panjang seluruh drainase didaerah kabupaten (KM) X 100	6.57	7.04
				Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (KM) / panjang seluruh drainase didaerah kabupaten (KM) X 100	87.40	87.75
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	87.75					
	tidak terjadi genangan > 2 kali setahun			tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (KM) / panjang seluruh drainase didaerah kabupaten	87.40	87.75

					(KM) X 100		
Mewujudkan ketersediaan air minum perkotaan/pedesaan	Persentase penduduk berakses air minum	15.5	Meningkatnya ketersediaan air minum perkotaan/pedesaan	Persentase penduduk berakses air minum	Penduduk berakses air minum / Jumlah penduduk X100	13.10	15.5
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	2.2		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	Jumlah Penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan /jumlah penduduk seluruhnya X 100	1.50	2.2
	persentase rumah tinggal bersanitasi			persentase rumah tinggal bersanitasi	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi / jumlah rumah tinggal X 100	27.17	28.49
Mewujudkan Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	42.22	Meningkatnya Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	jumlah daya tampung tempat pemakaman umum / jumlah penduduk X 100	42.65	42.22
	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB	21.05		Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau / Luas Wilayah ber HPL/HGB X 100	37.76	21.05
	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	95.29		Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Luas RTH Publik yang Tersedia diakhir tahun Pencapaian SPM/Luasan RTH Publik	95.29	95.29

					yang seharusnya Tersedia diwilayah Kota / kawasan perkotaan X 100		
Mewujudkan kawasan cepat tumbuh	Rasio rumah layak huni	0.2	meningkatnya kawasan cepat tumbuh	Rasio rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni / jumlah penduduk X 100	0.192	0.194
	Rasio permukiman layak huni	0.995		Rasio permukiman layak huni	luas permukiman layak huni / luas wilayah permukiman X 100	0.994	0.996
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni	jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / jumlah rumah di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100	97.67	98.59
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97.94					
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	78.41		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu /jumlah rumah X 100	76.14	83.97

	Persentase permukiman yang tertata	13.85		Persentase permukiman yang tertata	Luas Area Permukiman Tertata /luas Area Permukiman Keseluruhan X 100	12.00	13.85
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	25.36		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	luas permukiman kumuh yang tertangani / luas permukiman kumuh X 100	59.88	70.97
	Persentase areal kawasan kumuh	0.19		Persentase areal kawasan kumuh	luas kawasan kumuh / luas wilayah X100	0.21	0.15
	Persentase kawasan permukiman yang belum dapat di lalui kendaraan roda 4	50		Persentase kawasan permukiman yang belum dapat di lalui kendaraan roda 4	Jumlah Kawasan Permukiman Penduduk Yang Belum Dilalui Kendaraan Roda 4 /Jumlah Seluruh Kawasan Permukiman Penduduk X 100	3.03	50

Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan diatas selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Kotamobagu Tahun 2017-2018 sebagaimana pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
IKU (Indikator Kinerja Utama)

b. Indikator Kinerja Utama

No.	INDIKATOR SASARAN	FORMULA
1	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembangunan air (minimal 1.5 m)	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (KM)}}{\text{panjang seluruh drainase didaerah kabupaten (KM)}} \times 100$
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (KM)}}{\text{panjang seluruh drainase didaerah kabupaten (KM)}} \times 100$
	tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (KM)}}{\text{panjang seluruh drainase didaerah kabupaten (KM)}} \times 100$
2	Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100$
	persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{jumlah rumah tinggal}} \times 100$
3	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$
	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB	$\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas Wilayah ber HPL/HGB}} \times 100$
	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luas RTH Publik yang Tersedia diakhir tahun Pencapaian SPM}}{\text{Luasan RTH Publik yang seharusnya Tersedia diwilayah Kota / kawasan perkotaan}} \times 100$
4	Rasio rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$
	Rasio permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{luas wilayah permukiman}} \times 100$
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah rumah di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100$
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah rumah}} \times 100$
	Persentase permukiman yang tertata	$\frac{\text{Luas Area Permukiman Tertata}}{\text{Luas Area Permukiman Keseluruhan}} \times 100$
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100$
	Persentase areal kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100$
	Persentase kawasan permukiman yang belum dapat di lalui kendaraan roda 4	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Permukiman Penduduk Yang Belum Dilalui Kendaraan Roda 4}}{\text{Jumlah Seluruh Kawasan Permukiman Penduduk}} \times 100$

c. RKT (Rencana Kerja Tahunan)

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP –KK) Kota Kotamobagu Tahun 2017 yang merupakan penjabaran perencanaan tahun ke 3 (Tiga) dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas PRKP Kota Kotamobagu Tahun 2017-2019 diuraikan sebagaimana pada Tabel 1.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
			2017
1	Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembangunan air (minimal 1.5 m)	6.57
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	87.40
		tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	12.25
2	Meningkatnya ketersediaan air minum perkotaan/pedesaan	Persentase penduduk berakses air minum	13.10
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	1.50
		persentase rumah tinggal bersanitasi	27.17
3	Meningkatnya Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	42.65
		Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB	37.76
		Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	95.29
4	Meningkatnya kawasan cepat tumbuh	Rasio rumah layak huni	0.19
		Rasio permukiman layak huni	0.995
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97.94
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	78.41
		Persentase permukiman yang tertata	12.00
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	52.95
		Persentase areal kawasan kumuh	0.53
		Persentase kawasan permukiman yang belum dapat di lalui kendaraan roda 4	3.03

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Tahun 2017

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
			2017
1	Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembangunan air (minimal 1.5 m)	6.57
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	87.40
		tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	12.25
2	Meningkatnya ketersediaan air minum perkotaan/pedesaan	Persentase penduduk berakses air minum	13.10
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	1.50
		persentase rumah tinggal bersanitasi	27.17
3	Meningkatnya Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	42.65
		Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB	37.76
		Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	95.29
4	Meningkatnya Kawasan Cepat Tumbuh	Rasio rumah layak huni	0.19
		Rasio permukiman layak huni	0.994
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97.67
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	76.14
		Persentase pemukiman yang tertata	12.00
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	59.88
		Persentase kawasan permukiman yang belum dapat di lalui kendaraan roda 4	3.03
		Persentase areal kawasan kumuh	0.21

Untuk pencapaian indikator kinerja sasaran di atas akan dilaksanakan melalui beberapa program sebagaimana pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN	Ket
1	Program Pembangunan Saluran Drainas Gorong-gorong	1,728,249,875.00	
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	11,284,151,421.00	
3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,358,059,250.00	
4	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3,313,403,000.00	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, berikut perbandingan target dan realisasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2017.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembangunan air (minimal 1.5 m)	6,57	6,57	100%
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	87.40	87.40	100%
		Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	12.25	12.25	100%
2	Meningkatnya Ketersediaan air minum perkotaan/ pedesaan	Persentase Penduduk berakses air minum	13.10	13.65	104.18%
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	1.50	1.956	130.40%
		Persentase Rumah tinggal besanitasi	27.17	27.17	100%
3	Meningkatnya Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas wilayah ber PHL/HGB	Rasio Tempat Pemakaman umum persatuan penduduk	42.65	42.65	100%
		Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HBG	37.76	37.76	100%
		Luas RTH public sebesar 20% dari Luas wilayah Kota / kawasan Perkotaan	95.29	95.29	100%
	Meningkatnya kawasan cepat tumbuh	Rasio Rumah Layak Huni	0.192	0.192	100%
		Rasio Permukiman Layak Huni	0.994	0.994	100%
		Cakupan Ketersediaan rumah layak huni	97.67	97.67	100%
		Cakupan layanan Rumah layak huni yang terjangkau	76.14	76.14	100%

	Persentase Permukiman yang tertata	12.00	12.00	100%
	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	59.88	59.88	100%
	Persentase Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	3.03	12.121	4.00%
	Persentase areal kawasan kumuh	0.21	0.21	1.00%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotamobagu *khususnya untuk pencapaian sasaran* dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat**

Pencapaian sasaran 1 Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat di ukur dengan 3 indikator yaitu :

1. Indikator Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembangunan air (minimal 1.5 m)

Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase (KM) pada tahun 2017 sepanjang 17.45 Km. panjang seluruh Jalan Kabupaten sepanjang 265.85 Km. maka realisasi kinerja sebesar 6.57%.

dari target yang ditetapkan sebesar 6.57%, dengan realisasi kinerja 6.57% maka capaian kinerja sebesar 100% ($\text{realisasi/target} \times 100\%$)

berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 6.57% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 7.04 maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 93.32%

2. Indikator persentase Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat.

Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (KM) pada tahun 2017 sepanjang 464, 67 Km. panjang seluruh drainase didaerah kabupaten (KM) sepanjang 531.69. maka realisasi kinerja sebesar 87,40%

dari target yang ditetapkan sebesar 87,40%, dengan realisasi kinerja 87,40% maka capaian kinerja sebesar 100% ($\text{realisasi/target} \times 100\%$)

berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 87,40% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 87,75% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 99,60%

3. Indikator Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun.

Luasan Daerah yang tergenang pada tahun 2017 2.58 Ha. Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang 21.06 Ha maka Realisasi Kinerja sebesar 12.25%.

Dari target yang ditetapkan sebesar 12.25 % , dengan realisasi kinerja 12.25% maka capaian kinerja sebesar 100% (realisasi/target x 100%).

upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran adalah dengan perencanaan pembangunan drainase perkotaan dan desa kelurahan agar seluruh jalan mempunyai drainase yang baik, serta pemeliharaan dan pembersihan, pengerukan saluran drainase agar tidak terjadi genangan.

berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 12.25% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 10.49% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 116.77 %

• **Meningkatnya ketersediaan air minum perkotaan / pedesaan**

Pencapaian sasaran 2 Meningkatkan ketersediaan air minum perkotaan / pedesaan dengan 3 indikator yaitu :

1. Persentase penduduk berakses air minum

Penduduk berakses Air minum pada tahun 2017 16940 Jiwa. Jumlah Penduduk 124.124 Jiwa maka Realisasi Kinerja sebesar 13.65 %.

Dari target yang ditetapkan sebesar 13.10 % , dengan realisasi kinerja 13.65% maka capaian kinerja sebesar 104.18 % (realisasi/target x 100%)

berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 13.65 % dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 15.50% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 88.06 %

2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan

Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan pada tahun 2017 2428 Jiwa. Jumlah Penduduk seluruhnya 124124 Jiwa maka Realisasi Kinerja sebesar 1.956%.

Dari target yang ditetapkan sebesar 1.50 % , dengan realisasi kinerja 1.956% maka capaian kinerja sebesar 130.40 % (realisasi/target x 100%)

berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 1.956 % dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 2.20% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 88.909%

3. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi 8.005 Unit. Jumlah rumah Tinggal 29465 Unit maka Realisasi Kinerja sebesar 27.17%.

Dari target yang ditetapkan sebesar 27.17 % , dengan realisasi kinerja 27.17% maka capaian kinerja sebesar 100% (realisasi/target x 100%)

upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran adalah dengan adanya pembangunan SPAL terpusat skala komunal domestic beserta pemasangan SR (Sambungan Rumah), serta adanya pengadaan sarana dan prasarana air Limbah dan sistem perencanaan yang baik dalam pengelolaan air limbah , dan pemanfaatan idele capacity SPAM IKK pada Kotamobagu Selatan , Pontodon, Kobo Kecil, Bilalang I, serta juga penyambungan listrik IPA kobo kecil.

berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 27.17 % dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 28.49% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 95.366 %

• **Meningkatnya Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB**

Pencapaian sasaran 3 Meningkatkan Rasio Ruang terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB diukur dengan 3 Indikator yaitu :

1. Indikator Rasio Tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk

Jumlah daya tampung tempat pemakaman pada tahun 2017 55000 Ha. Jumlah penduduk 128957 jiwa. maka realisasi kinerja sebesar 42.65%

dari target yang ditetapkan sebesar 42.65%, dengan realisasi kinerja 42.65% maka capaian kinerja sebesar 100% (realisasi/target x 100%)

berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 42.65% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 42.22% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 101.01%



2. Indikator Rasio Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL / HGB
Luas ruang terbuka hijau pada tahun 2017 2570 Ha. Luas wilayah ber HPL / HGB 6806 Ha. maka realisasi kinerja sebesar 37.76 %
dari target yang ditetapkan sebesar 37.76%, dengan realisasi kinerja 37.76% maka capaian kinerja sebesar 100% ($\text{realisasi/target} \times 100\%$)
berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 37.76% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 21.05% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 179.38%
3. Indikator Luas RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan
Luas RTH Publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM pada tahun 2017 2570 Ha. Luas RTH public yang seharusnya tersedia diwilayah kota/ kaasan perkotaan 2697 Ha. maka realisasi kinerja sebesar 95.29%
dari target yang ditetapkan sebesar 95.29%, dengan realisasi kinerja 95.29% maka capaian kinerja sebesar 100% ($\text{realisasi/target} \times 100\%$)
upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran adalah dengan adanya pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kelurahan Biga, serta pemeliharaan Lampu penerangan jalan / fasilitas umum (Listrik Prabayar).
Dan juga penyusunan DED taman Kota , DED Lapangan Kotamobagu.
berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 95.29% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 95.29% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 100%

- **Meningkatnya Kawasan Cepat Tumbuh.**

Pencapaian sasaran 4 Meningkatkan Kawasan Cepat Tumbuh dengan 8 indikator yaitu:

1. Indikator Rasio Rumah Layak Huni
Jumlah Rumah Layak huni 2 pada tahun 2017 23840 Unit. Jumlah Penduduk 124124 Jiwa. maka realisasi kinerja sebesar 0.192%
dari target yang ditetapkan sebesar 0.192 %, dengan realisasi kinerja 0.192% maka capaian kinerja sebesar 100% ($\text{realisasi/target} \times 100\%$)



berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 0.192% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 0.194% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 98.96 %

2. Indikator Rasio Permukiman layak huni

Luas Permukiman Layak huni pada tahun 2017 adalah 2332.77 Ha. Luas wilayah permukiman adalah 2347.24 Ha. maka realisasi kinerja sebesar 0.994%

dari target yang ditetapkan sebesar 0.994%, dengan realisasi kinerja 0.994% maka capaian kinerja sebesar 100% ($\text{realisasi/target} \times 100\%$)

berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 0.994.% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 0.996% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 99.79%

3. Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni

Jumlah seluruh rumah layak huni disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu pada tahun 2017 adalah 23840 unit. Jumlah Rumah disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 24408 Unit. maka realisasi kinerja sebesar 97.67%

dari target yang ditetapkan sebesar 97.67%, dengan realisasi kinerja 97.67% maka capaian kinerja sebesar 100% ($\text{realisasi/target} \times 100\%$)

berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 97.67% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 98.59% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 99.06%

4. Cakupan layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau

Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu pada tahun 2017 adalah 2189 kk. Jumlah Rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu 2875 kk. maka realisasi kinerja sebesar 76.14%

dari target yang ditetapkan sebesar 76.14%, dengan realisasi kinerja 76.14% maka capaian kinerja sebesar 100% ($\text{realisasi/target} \times 100\%$)

berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 76.14% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 83.97% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 90.67%



5. Persentase Permukiman yang tertata
Luas Area Permukiman yang tertata pada tahun 2017 adalah 281.66 Ha. Luas area permukiman keseluruhan 2347.24 Ha. maka realisasi kinerja sebesar 12.00%
dari target yang ditetapkan sebesar 12.00%, dengan realisasi kinerja 12.00% maka capaian kinerja sebesar 100% ($\text{realisasi/target} \times 100\%$)
berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 12.00% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 13.85% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 86.64%
6. Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan
Luas permukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2017 adalah 21.60 Ha. Luas permukiman kumuh 36.07 Ha. maka realisasi kinerja sebesar 59.88% dari target yang ditetapkan sebesar 59.88%, dengan realisasi kinerja 59.88% maka capaian kinerja sebesar 100% ($\text{realisasi/target} \times 100\%$)
berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 59.88% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 70.97% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 84.37 %
7. Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda4
Jumlah Kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 adalah 4 Lokasi pada tahun 2017. Jumlah seluruh kawasan permukiman Penduduk 33 Lokasi. maka realisasi kinerja sebesar 12.121% dari target yang ditetapkan sebesar 3.03%, dengan realisasi kinerja 12.121% maka capaian kinerja sebesar 4.00% ($\text{realisasi/target} \times 100\%$)
berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 12.121% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 50% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 24.24%
8. Persentase Areal Kawasan Kumuh
Luas Kawasan Kumuh 14.477 Ha pada tahun 2017. Luas wilayah 6806 Ha. maka realisasi kinerja sebesar 0.21%
dari target yang ditetapkan sebesar 0.21%, dengan realisasi kinerja 0.21% maka capaian kinerja sebesar 100 % ($\text{realisasi/target} \times 100\%$)



upaya yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran adalah dengan adanya pembangunan paving Block di kota kotamobagu, serta adanya perencanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan jalan permukiman , serta pemeliharaan median jalan tersebar.

berdasarkan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 0.21% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 0.15% maka capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra sebesar 140%

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah

1. Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong – gorong Rp. 1.731.285.000,-
2. Program Pengembangan kinerja pengelolaan Air minum dan air Limbah Rp. 10.555.753.000,-
3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp. 2.741.180.000,-
4. Program Pengembangan wilayah Cepat Tumbuh Rp. 3.452.080.000,-

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2017

No.	Program dan Kegiatan	(Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
	BELANJA			
B	BELANJA LANGSUNG	19,399,476,097	18,718,776,764	96.49%
21	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1,728,249,875	1,718,458,675	99.43%
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Kompleks Belakang Kantor Lurah Kobo Besar	105,038,300	105,038,300	100.00%
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Kompleks Lapangan Nunuk Matali Cs (Lanjutan)	132,233,200	132,230,700	100.00%
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Desa Poyowa Besar 1 Cs (Lanjutan)	144,218,250	144,216,350	100.00%
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lorong AMD Kel. Molinow (Lanjutan) Cs	144,051,800	140,899,900	97.81%
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lorong Kuburan Desa Kopandakan 1 Cs (Lanjutan)	132,972,600	132,970,700	100.00%
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Dusun 1 Desa Pontodon Timur	144,436,900	144,435,900	100.00%
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RT 6 Lorong Pancasila Desa Tabang	144,071,525	144,070,525	100.00%
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Samping Polres Kompleks Dua Jalur Kel. Kotobangon	140,142,000	139,141,000	99.29%
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kompleks SDN 2 Kel. Kobo Besar	226,574,100	226,274,100	99.87%

	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Drainase/Gorong-Gorong	160,869,800	158,869,800	98.76%
	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	37,352,900	37,202,900	99.60%
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong Dalam Kota	216,288,500	213,108,500	98.53%
22	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	11,284,151,421.70	10,728,830,221	85.38%
	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR Di Kel. Kotobangon (DAK Penugasan)	513,492,400	513,492,400	100.00%
	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR Di Kel. Sinindian (DAK Penugasan)	514,046,600	514,046,600	100.00%
	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR Di Kel. Matali (DAK Penugasan)	511,039,900	506,539,900	99.12%
	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kel. Pobundayan (DAK Penugasan)	511,341,200	510,741,200	99.88%
	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kel. Mongkonai Barat (DAK Penugasan)	508,544,500	507,944,500	99.88%
	Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kel. Mongondow (DAK Penugasan)	461,002,150	461,001,800	100.00%
	Pembangunan SPAL Komunal Dengan Jaringan perpipaan Desa Kopandakan 1 (DAK Penugasan)	461,347,750	461,347,400	100.00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK Penugasan)	462,297,000	-	0.00%
	Perencanaan Pengelolaan Air Limbah	43,457,850	43,457,850	100.00%
	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Kotamobagu Selatan	1,051,699,000	1,050,692,000	99.90%
	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Pontodon	1,988,549,000	1,988,440,900	99.99%
	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Kobo Kecil	1,679,766,050	1,679,736,700	100.00%
	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Bilalang 1	981,197,000	979,874,000	99.87%
	Penyambungan Listrik IPA Kobo Kecil (Lanjutan)	185,708,000	185,408,000	99.84%
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum (Swakelola)	177,649,800	176,949,800	99.61%
	Penyediaan Dokumen UKL-UPL IPLT Desa Tabang	54,625,000	54,625,000	100.00%
	Pembuatan DED SPAM Kec. Kotamobagu Barat dan Kec. Kotamobagu Timur	-	-	0.00%
	Operasional Penarikan Retribusi Air Minum	52,000,000	52,000,000	100.00%
	Operasional Pengelolaan Instalasi Produksi Air Bersih	24,000,000	23,995,238	99.98%
	Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Transmisi dan Sambungan di Desa Pontodon Timur (Sisa 2016)	416,456,800	413,356,800	99.26%
	Optimalisasi SPAM IKK Pontodon (Sisa 2016)	135,840,421.70	133,240,421.70	98.09%
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kel. Gogagoman Kec. Kotamobagu Barat (Sisa 2016)	460,091,000	460,091,000	100.00%
	Penyambungan Lanjutan Listrik IPA Kobo Kecil	90,000,000	11,848,711	13.17%
23	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3,313,408,000	3,313,091,350	99.99%
	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Palapa		180,527,150	100.00%

	Mogolaing	180,527,150		
	Pembangunan Gapura Kampung KB Kompleks Lorong Talaga Kel. Gogagoman	190,138,000	190,138,000	100.00%
	DED Gapura Kampung KB Kompleks Lorong Talaga Kel. Gogagoman	-	-	#DIV/0!
	Pembangunan Paving Blok Kampung KB Lorong Talaga CS Kel. Gogagoman	161,442,000	161,442,000	100.00%
	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Raten Gogagoman	180,473,550	180,473,550	100.00%
	Pembangunan Jalan Paving Blok RT. 05 Depan Musholah Motoboi Kecil	161,443,000	161,443,000	100.00%
	Pembangunan Jalan Paving Blok Kompleks Polsek Kotamobagu Mogolaing	180,564,250	180,564,250	100.00%
	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Baru RT. 23 Gogagoman	180,579,250	180,579,250	100.00%
	Pembangunan Jalan Paving Blok Kompleks Lapangan Nunuk Matali	180,486,650	180,486,650	100.00%
	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Panorama Gogagoman	180,383,250	180,381,450	100.00%
	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Depan SMP 5 Kotamobagu	180,095,000	180,071,900	99.99%
	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Belakang SDN 1 Sinindian	176,004,450	176,004,450	100.00%
	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Gembira Kel. Mongkonai Induk	180,465,050	180,465,050	100.00%
	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Kelapa	180,557,850	180,557,850	100.00%
	Pembangunan Jalan Paving Blok Jalan Rawamangun	177,597,050	177,597,050	100.00%
	Pembangunan Jalan Paving Blok Lorong Juang RT. 24 Kel. Gogagoman	110,542,000	110,502,000	99.96%
	Pembangunan Jalan Paving Blok Depan PU Seksi Mogolaing	180,601,000	180,529,250	99.96%
	Perencanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Jalan Permukiman	231,099,900	231,009,900	99.96%
	Pemeliharaan Median Jalan Tersebar (Swakelola)	217,281,100	217,191,100	99.96%
	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Pagar TPA (Sisa 2016)	83,127,500	83,127,500	100.00%
25	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,358,059,250	1,265,135,172	93.16%
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Biga	230,453,750	227,303,750	98.63%
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan / Fasilitas Umum (Listrik Prabayar)	150,693,500	134,894,000	89.52%
	Pemeliharaan RTH Kawasan Tersebar	210,382,000	204,382,000	97.15%
	Penyusunan DED Taman Kotamobagu	-	-	0.00%
	Penyusunan DED Lapangan Kotamobagu	-	-	0.00%
	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	566,530,000	558,344,822	98.56%
	Pemasangan Peralihan Peralatan Listrik Sistem Pascabayar Ke Prabayar	200,000,000	140,210,600	70.11%

**Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
pada SKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan permukiman
Kota Kotamobagu Tahun 2017.**

Tabel. 3.3
PAD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Tahun 2017

No.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
1	Hasil Retribusi Daerah			
	- Retribusi Air Minum	275.000.000	275.131.300	90.80
	- Retribusi Rusunawa Gogagoman	28.000.000	28.400.000	9.37
Jumlah		303.000.000	303.531.300	100.18

Berdasarkan *tabel* di atas pencapaian target Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 sebesar Rp. 303.531.300

BAB IV

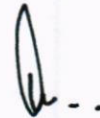
P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) Tahun 2017 ini adalah laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu yang mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan dengan harapan semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan kendala yang tidak bias diprediksi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) Tahun 2017 ini kami susun, semoga bermanfaat dan akan menjadi bahan pertimbangan dan kebijakan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menangani dan mengembangkan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman kedepan.

Kotamobagu, November 2017
**Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu**



Ir. IMRAN AMON
Pembina Utama Muda
Nip. 19600613 199403 1 002

